

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) DI KECAMATAN SERASAN TIMUR

Oleh:

HENNI FRAMITA

NIM. E43012015

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2017

E-mail: paramitaheni@rocketmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana proses Implementasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Di Kecamatan Serasan Timur Tentang Bantuan Langsung Masyarakat (SPP) Di Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna. Melalui metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Lokasi peneliti ini adalah Desa Arung Ayam Kecamatan Serasan Timur. Subjek penelitian adalah kantor PNPM Serasan Timur, (BLM) (SPP) Tokoh masyarakat. hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan (PNPM) (BLM) simpan pinjam (SPP) merupakan salah satu cara untuk menghindari masyarakat yang kurang mampu dan mampu membantu masyarakat dalam meminjam modal usaha. Hanya saja pada pelaksanaan di lapangan masih ditemukan masyarakat yang lambat dalam mengembalikan dana simpan pinjam (SPP) untuk penguliran dan tidak sesuai dengan tanggal dan waktu yang telah ditentukan pada saat musyawarah antar desa (MAD). Hal ini disebabkan dari masyarakat yang tidak bertanggungjawab atas apa yang mereka pinjamkan dibantuan langsung masyarakat (BLM). Hal ini disebabkan oleh kurangnya sarana dan prasarana dibidang teknis, kurangnya pengawasan dalam PNPM dilapangan yang mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan wewenang, belum adanya sanksi yang tegas bagi pelanggar simpan pinjam (SPP), kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dalam proses pinjaman (SPP). Kurang maksimalnya Implementasi Kebijakan (PNPM) tantang bantuan langsung masyarakat (BLM) (SPP) di Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna dikarenakan tidak maksimalnya tiga aktivitas Implementasi Kebijakan antara lain aktivitas sosialisasi, aktiivitas penyaluran, dan aktivitas pemanfaatan.

Kata-kata Kunci : Implementasi Kebijakan, PNPM, Simpan Pinjam (SPP)

Abstract

This research was aimed to know and analyze the process of Society Empowerment National Program in Serasan Timur District about direct cash assistance in Searasan Timur district of Natuna Regency. The location of the research was Arung Ayam Village in Serasan Timur District. The subject of the research was the Society Empowerment National Program Office of Serasan Timur, Direct Cash Assistance and Savings an Loan. are one of the way to avoid the disadvantages communities and to help the society in borrowing money for venture capital. However, the implementation of this program, it is still found that the society are late in refunding the money and the date when they refund the money are not appropriate as the specified date in villages deliberations. It is because the society is not responsible on their loan, the lack of facilities and infrastructure in technical fields, the lack of supervision in th field which cause authority abuse, the absence of the strict punishment for the violators, and the lack of socialization toward society in the process of savings and loan. The implementation of Implementation of Society Empowerment National Program asked for Community Grants and Saving and Loans in Serasan Timur District of Natuna Regency because the three activities of policy implementation such as social activity, distribution activity, and utilization activity are not maximum.

Key words: Policy Implementation, Implementation of Society Empowerment National Program, Saving and Loans.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) merupakan Program Nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. munculnya (PNPM) ini dari pemerintahan dimana untuk membantu masyarakat yang miskin dan dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulasi untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) sebelum Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) ini ada beberapa jenis Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) diantaranya program Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Penanggulan Kemiskinan di Perkotaan (P2PK), Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Diluncurkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2008 bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan pecintaan

lapangan kerja. PNPM merupakan mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur dari masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat terutama masyarakat miskin dapat ditumbuhkan kembangkan sehingga masyarakat miskin tersebut bukan sebagai objek melainkan sebagai subjek upaya penanggulangan kemiskinan.

Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Tahun Anggaran 2014 Kecamatan Serasan Timur dan perbedaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). persediaan Surat Penerapan Camat Kecamatan Serasan Timur karena menurut data yang sesungguhnya harus sama pelaksanaannya antara Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Tahun Anggaran 2014 dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Surat Penetapan Camat Kecamatan Serasan Timur. Dari data diatas banyak sekali kejanggalan yang Desa Harapan Baru di Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Tahun Anggaran 2014 ada sedangkan di Surat Penetapan

Camat Serasan Timur tidak ada data tersebut diantaranya

1. Desa Harapan Baru jenis kegiatannya Pagar Tpq
2. Desa Harapan Baru jenis kegiatannya Pagar Paud
3. Desa Harapan Baru jenis kegiatannya Simpan Pinjam (SPP)

Dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan masyarakat (PNPM) Tahun Anggaran 2014 terdapat OP TPK dan OP UPK sedangkan didalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) surat Penetapan Camat Kecamatan Serasan Timur itu tidak ada datanya

Tabel 1
 Nama Desa dan jenis kegiatan PNPM perdesaan Serasan Timur Kabupaten Natuna tahun 2015.

N o	Nama Desa	Jenis Kegiatan	Vol	Jumlah Bantuan (RP)
1	Air Nusa	Pagar Taman Kanak-kanak (TK)	70 × 1,5M	99.311.000,00
2	Arung Ayam	Jalan Rabat Beton	125 × 2 M	45.852.000,00
3	Air Ringgau	Tambatan Perahu	100 × 2 M	241.568.000,00
4	Harapan Baru	Poskesdes	8 × 7 M	141.244.000,00
		Simpan Pinjam (SPP)	2 Kelom pok	90.000.000,00
5		Operasional Tim Pengelola Kegiatan (TPK)		19.515.000,00
6		Operasional Unit Pengelola Kegiatan (Upk)		13.010.000,00
Total Bantuan				650.000.000,00

Sumber : Kantor PNPM Serasan Timur 23 Agustus 2016

Di lihat dari tabel Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Tahun Anggaran 2015 Kecamatan Serasan Timur banyak yang tidak sama data pelaksanaannya dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Surat Penetapan Camat. Dilihat dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan masyarakat (PNPM) Tahun Anggaran 2015 Desa Harapan Baru itu ada 2 di antara

1. Desa Harapan Baru jenis kegiatan Poskesdes
2. Desa Harapan Baru jenis kegiatan Simpan Pinjam (SPP)

Sedangkan Program Nasional Pemberdayaan masyarakat (PNPM) Surat Penetapan Camat ada 3 Desa Harapan Baru diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Desa Harapan Baru jenis kegiatan kesehatan
2. Desa Harapan Baru jenis kegiatan Simpan Pinjam (SPP)
3. Desa harapan Baru jenis kegiatan kelompok Perempuan

Dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2015 Kecamatan Serasan Timur ada OP TPK dan OP UPK sedangkan di PNPM Surat Penetapan Camat itu tidak ada datanya seharusnya data itu sama, antara Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program

Nasional Pemberdayaan masyarakat (PNPM) Tahun Anggaran 2015 Kecamatan Serasan Timur dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Surat Penetapan Camat. Dalam peneliti hanya di fokuskan pada implementasi kebijakan Simpan Pinjam (SPP). Kegiatan Simpan Pinjam (SPP) dapat di gambarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2
Nama Desa dan Kelompok Simpan Pinjam (SPP) di Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna.

No	Tahun	Nama Desa	Kelompok	Dana
1	2014	Arung Ayam	1	126.315.000
2	2015	Harapan Baru	2 x	47.368.000
Jlh	221.051.000			

Sumber : Kantor PNPM Kecamatan Serasan Timur 23 Agustus 2016

Berdasarkan tabel diatas Desa Arung Ayam dan Desa Harapan Baru ini lambat proses pembayaran setiap bulannya kepada kantor PNPM, yang dimana setiap bulannya harus menyetorkan kepada kantor PNPM dan ini lambat dalam mengembalikan uang bulanannya. Diantaranya Desa Arung Ayam yang dananya Rp. 126.315.000 hanya mengembalikan 63.157.500 dan berikutnya Desa Harapan Baru yang dananya 94.736.000 hanya mengembalikan 31.578.500 ini dikarenakan masyarakat tidak menggunakan dana tersebut dengan sebaiknya dana Bantuan Langsung

Masyarakat (BLM) simpan pinjam (spp) digunakan untuk memberikan modal kepada masyarakat untuk membuka usaha. Pada saat peneliti melakukan penelitian banyak dari masyarakat yang salah dalam menggunakan dana simpan pinjam (spp) ini dan tidak bisa mengembalikan dana simpan pinjam (spp) tepat waktunya dan seharusnya disetorkan setiap bulannya kepada kantor PNPM sesuai dengan pinjaman masyarakat masing-masing.

2. Fokus Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan identifikasi masalah maka penelitian ini di fokuskan pada proses simpan pinjam (SPP) yang di pinjamkan kepada masyarakat dan cara mengembalikannya lama.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana proses implementasi kebijakan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) pada Kecamatan Serasan Timur bidang simpan pinjam (SPP).

4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) pada Kecamatan

Serasan Timur tentang bidang simpan pinjam (SPP).

B. KAJIAN TEORI

Menurut Fredrickson dan Hart (dalam Tangkilisan, 2003:12), kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan/mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Salah satu tolak ukur dari suatu kebijakan adalah dari proses implementasinya itu sendiri. Implementasi kebijakan publik tidak hanya mengenai prosesnya saja tetapi dari hasil implementasi itu sendiri sehingga dapat dikatakan implementasi kebijakan tersebut berhasil atau tidak. Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2008:139) mendefinisikan implementasi kebijakan publik suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktifitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Menurut Thomas R. Dye (1992:328) proses kebijakan publik meliputi beberapa hal berikut.

1. Identifikasi masalah kebijakan (identification of policy problem)
2. Identifikasi masalah kebijakan dapat dilakukan melalui identifikasi apa yang menjadi tuntutan (demands) atas tindakan pemerintah.
3. Penyusunan agenda (agenda setting) merupakan aktivitas memfokuskan perhatian pada pejabat publik dan media masa atas keputusan apa yang akan diputuskan terhadap masalah publik tertentu.
4. Perumusan kebijakan (policy formulation)

Perumusan (formulation) merupakan tahapan pengusulan rumusan kebijakan melalui inisiasi dan penyusunan usulan kebijakan melalui organisasi perencanaan kebijakan, kelompok kepentingan.

Menurut Erwan Agus Purwanto implementasi adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy output) yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran (trage group) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Adapun yang bisa muwujudkan implementasi tersebut antara lain:

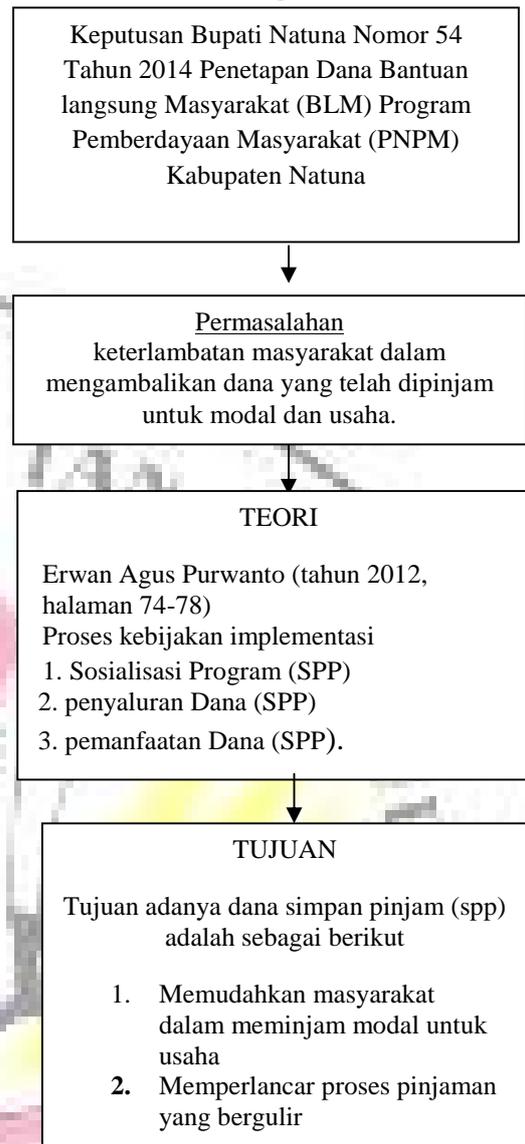
1. Sosialisasi diartikan sebagai upaya pelaksanaan untuk membuat masyarakat tahu dan sadar bahwa ada suatu kebijakan yang akan di implementasikan dan konsekuensi dari implementasi tersebut dapat berdampak positif (menghasilkan manfaat bagi suatu kelompok) akan tetapi bisa juga berdampak negatif bagi kelompok yang lain. Sosialisasi dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Sosialisasi secara langsung dilakukan melalui: ceramah, forum warga, sarasehan, dialog interaktif lewat radio/tv/internet. Sedangkan sosialisasi secara tidak langsung terjadi ketika para petugas garda depan (street-level bureaucrats) dalam mensosialisasikan suatu kebijakan tidak berinteraksi dengan kelompok sasaran maupun stakeholders secara face-to-face tetapi melalui papan pengumuman, pamlet, leaflet, spanduk, brosur, buku saku, iklan layanan masyarakat lewat tv, radio, surat kabar, dan website. Didalam bantuan langsung masyarakat (BLM) simpan pinjam (SPP) dengan adanya sosialisasi secara langsung dan sosialisasi secara tidak langsung sangat membantu dalam pelaksanaan simpan pinjam (SPP). Dari penelitian nama Desa dan Kelompok Simpan Pinjam (SPP) di Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna.
2. Penyaluran atau delivery activities yaitu kegiatan untuk menyampaikan policy output kepada kelompok sasaran. misalnya pemberian pelayanan (seringkali gratis) maupun realisasi bantuan (dana simpan pinjam yang diberikan oleh pemerintah seperti untuk di pergunakan untuk modal usaha. Kriteria baik disini dapat dijelaskan melalui beberapa indikator, yaitu: tepat waktu penyampaian, tepat kuantitas, tepat kualitas, dan tetap sasaran. Dengan kata lain, policy effect yang baik dinilai dari cakupan (coverage) kelompok sasaran. Tahap berikutnya setelah kelompok sasaran menerima policy output adalah dimanfaatkannya bantuan tersebut untuk kegiatan yang menunjang kehidupan utama kelompok sasaran. Sebagai seorang masyarakat menerima bantuan langsung masyarakat (BLM) simpan pinjam (SPP) dari pemerintah maka masyarakat tersebut menggunakan dana tersebut dengan lebih baik.
3. Pemanfaatan merupakan salah satu manfaat bagi masyarakat guna mempermudah masyarakat dalam simpan pinjam, dan memberikan modal pinjaman kepada masyarakat dalam membuka usaha. Ini berguna bagi masyarakat dan kantor program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM). Ini merupakan cara membantu

masyarakat yang kurang mampu dalam membuka usaha. Maka dari itu pnpm memberi bantuan untuk mempermudah masyarakat dalam hal itu.

Dari beberapa teori diatas antara teori Charles O Jons dan teori Erwan Agus Purwanto peneliti menggunakan teori Erwan Agus Purwanto karena teori tersebut masuk ke dalam penelitian saya dan di teori Erwan Agus Purwanto terdapat teori sosialisasi, penyaluran, dan pemanfaatan dan sangat berkaitan sekali dengan judul saya Implementasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) tentang Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Simpan Pinjam (SPP) di Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna.

Gambar 1

KerangkaPikir



Sumber: Oleh Peneliti

C. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif. Satori dan Komariah (2011:25), menegaskan pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkapkan situasi

sosial tertentu dengan mendiskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan data dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah. Menurut Nawawi (1996:63), metode diskriptif adalah proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.

Tempat penelitian dilaksanakan pada Penelitian ini dilakukan di kantor PNPM di jalan Juklingkak No.1 Desa Arung Ayam Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna. Subjek dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berpotensi dalam untuk memberikan segala macam bentuk data dan informasi dalam mengulas masalah implementasi kebijakan PNPM pada kecamatan serasan Timur tentang Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Simpan Pinjam (SPP). Adapun informasi tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Ketua PNPM 1 orang
- b. Sekretaris PNPM 1 orang
- c. masyarakat 3 orang

Dalam penelitian ini yang digunakan dalam instrumen penm gumpulan data yaitu wawancara dan observasi. Teknik

pengumpulan dalam upaya memperoleh data dalam peneliti data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Selain itu, aktifitas dalam analisis data yaitu Reduksi Data (*data reduction*), Penyajian Data (*data display*), Verifikasi Data (*data verification*). Sedangkan untuk mendapatkan validitasnya menggunakan triangulasi sumber data.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi merupakan suatu keputusan untuk mencapai sasaran tertentu, maka untuk merealisasikan pencapaian sasaran tersebut diperlukan serangkaian aktivitas pelaksanaannya. Mengingat bahwa implementasi suatu program merupakan suatu hal yang kompleks karena banyaknya faktor yang saling mempengaruhi dan terkait, maka untuk memahami adanya perbedaan antara apa yang diharapkan tercapai dengan yang terjadi kemudian menimbulkan kesadaran mengenai pentingnya studi-studi implementasi. Dalam hal permasalahan implementasi kebijakan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) pada Kecamatan Serasan Timur bidang simpan pinjam (SPP), peneliti memfokuskan pada Proses implementasi kebijakan publik yaitu: Sosialisasi Program (SPP).

penyaluran Dana (SPP).pemanfaatan Dana (SPP).

1. Sosialisasi Dana Simpan Pinjam (SPP) Dalam Implementasi Kebijakan PNPM Dalam Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) di Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna

Sosialisasi diartikan sebagai upaya pelaksanaan untuk membuat masyarakat tahu dan sadar bahwa ada suatu kebijakan yang akan di implementasikan dan konsekuensi dari implementasi tersebut dapat berdampak positif (menghasilkan manfaat bagi suatu kelompok) akan tetapi bisa juga berdampak negatif bagi kelompok yang lain. Sosialisasi dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Sosialisasi secara langsung dilakukan melalui: ceramah, forum warga, sarasehan, dialog interaktif lewat radio/tv/internet. Sosialisasi secara tidak langsung terjadi ketika para petugas garda depan dalam mensosialisasikan suatu kebijakan tidak berinteraksi dengan kelompok sasaran melalui papan pengumuman, pamlet, leaflet, spanduk, brosur, buku saku, iklan layanan masyarakat lewat tv, radio, surat kabar, dan website. Didalam Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Simpan Pinjam (SPP) dengan adanya

sosialisasi secara langsung dan sosialisasi secara tidak langsung sangat membantu dalam pelaksanaan Simpan Pinjam (SPP).

Tahap sosialisasi ini lebih mengarahkan pada proses kegiatan turun langsung lapangan pada masyarakat dengan melakukan pertemuan langsung dengan masyarakat untuk dana Simpan Pinjam (SPP) tentang bagaimana menggunakan, dan mempertanggungjawabkan yang telah dipinjamkan. Penetapan prasarana dan sarana apa yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, penetapan tata kerja (juklak dan juknis), dan penetapan pelaksanaan kebijakan (Widodo, 2008:91).

Pada tahap sosialisasi ini, peneliti akan merangkum informasi dari badan penyelenggaran dana Simpan Pinjam (SPP) Kecamatan Serasan Timur sesuai dengan No 54 tahun 2014 penetapan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Kabupaten Natuna tahun anggaran 2014. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Harto (ketua PNPM Serasan Timur).

Bagaimana pendapat anda mengenai PNPM dan masyarakat dalam menyampaikan dana Simpan Pinjam (SPP) dengan melakukan

teknik secara langsung dengan menggunakan ceramah?

Jawab dari pak Harto

“ Pnpm dalam menyampaikan kepada masyarakat tentang dana simpan pinjam (SPP) juga dengan ceramah, karena dengan menggunakan cara ini mempermudah penjelasan dana Simpan Pinjam (SPP) dan dengan cara ini sangat membangun dan mendukung dalam pinjaman masyarakat tersebut. Pnpm melakukan ini biasanya di mesjid dan di gedung serba guna yang ada di Kecamatan Serasan Timur ini”.

Sama juga yang disampaikan oleh Ibu Fitria (sekretaris PNPM Serasan Timur) bagaimana PNPM menyampaikan kepada masyarakat dengan forum warga ?

Jawab dari Ibu Fitria

“ PNPM dalam menyampaikan dana Simpan Pinjam (SPP) dengan menggunakan forum warga itu sangat bagus sekali dan dilakukan setiap kali pertemuan antara PNPM dengan masyarakat dan ini juga mempermudah PNPM dan masyarakat dalam mengambil suatu keputusan tentang simpan pinjam (SPP) tersebut, forum warga ini biasanya dilakukan dikantor PNPM dan kantor Desa setempat”.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan pak Herman (masyarakat) bagaimanakah menurut anda cara PNPM menyampaikan dana Simpan Pinjam (SPP) dengan cara sarasehan?

Jawab dari Pak Herman

“ jarang sekali PNPM menyampaikan dengan cara sarasehan kepada masyarakat dalam dana simpan pinjam (SPP). Yang sering digunakan PNPM dalam menyampaikan dana simpan pinjam (SPP) kepada masyarakat adalah dengan menggunakan cara forum warga”.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara kepada pak Harto (ketua PNPM) bagaimana PNPM menyampaikan kepada masyarakat dengan cara dialog interaktif apakah melalui radio, tv, dan internet ?

Jawab dari Pak Harto

“ PNPM menyampaikan kepada masyarakat dengan cara dialog interaktif dengan menggunakan radio dan internet itu sangat mudah bahkan itu sering digunakan dalam teknik menyampaikan informasi dana simpan pinjam (SPP) kepada masyarakat yang meminjam dana simpan pinjam tersebut, dengan adanya radio dan internet membuat masyarakat lebih tahu akan informasi secara cepat, dan

dengan menggunakan dialog interaktif dengan tv, untuk dikawasan Natuna tv itu tidak bisa secara langsung dalam penyampaian kepada masyarakat tentang dana simpan pinjam (SPP) karena keterbatasan statelit yang kurang memadai dan Natuna belum ada statelit pribadi jadi tidak bisa menayangkan siaran khusus Natuna. Jadi untuk penyampaian dana simpan pinjam (SPP) yang dilakukan PNPM kepada masyarakat dengan menggunakan tv itu tidak bisa”.

Penelitian melakukan wawancara dengan ibu Samsiah (masyarakat) bagaimana PNPM menyampaikan dana simpan pinjam (SPP) kepada masyarakat dengan papan pengumuman ?

Jawab dari Ibu samsiah (masyarakat) *“sering digunakan dengan papan pengumuman karena untuk menyampaikan sesuai tentang dana simpan pinjam (SPP) di Serasan Timur, sering menggunakan papan pengumuman minsalnya ada rapat yang diadakan PNPM dengan masyarakat, dengan cara menggunakan papan pengumuman tersebut sangat mudah sekali cara penyampaian dengan masyarakat dengan papan pengumuman tersebut.”*

Hal senada juga disampaikan oleh Fitria, sekretaris PNPM Serasan Timur berkaitan dengan dana simpan pinjam (SPP) bagaimana pelaksanaan dalam sosialisasi kepada masyarakat dalam bantuan langsung masyarakat (BLM) simpan pinjam (SPP). *“bagaimana mekanisme pelaksanaan implementasi kebijakan terhadap bantuan langsung masyarakat (BLM) simpan pinjam (SPP) ?*

Jawab dari ibu Fitria

“mekanisme pelaksanaan kebijakan terhadap bantuan langsung masyarakat (BLM) simpan pinjam (SPP) sudah sangat baik dan sesuai dengan aturan yang ada di petunjuk teknik operasional (PTO) penjelasan X (sepuluh).”

Hasil sosialisasi dari uraian diatas, didapatkan bahwa bantuan langsung masyarakat (BLM) simpan pinjam (SPP) dengan sumberdaya apa saja yang mendukung dalam implementasi kebijakan simpan pinjam (SPP) berdasarkan bantuan langsung masyarakat (BLM) Kecamatan Serasan Timur menggunakan media informasi supaya tahu akan dana simpan pinjam itu akan keluar, dengan informasi tersebut bisa berinteraksi langsung kepada masyarakat selanjutnya dilakukan

musyawarah di tingkat Dusun, Desa, dan Kecamatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PNPM Kecamatan Serasan Timur telah mempunyai badan bantuan langsung masyarakat (BLM) dalam simpan pinjam (SPP). bantuan simpan pinjam ini mempermudah masyarakat dalam meminjam modal usaha, sehingga dalam pelaksanaannya harus sesuai peraturan yang telah dibuat, agar mencegah timbulnya sikap dan tindakan yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

2. Penyaluran Dana Simpan Pinjam (SPP) Dalam Implementasi Kebijakan PNPM bantuan langsung masyarakat (BLM) di Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna.

Penyaluran atau delivery activities yaitu kegiatan untuk menyampaikan policy output kepada kelompok sasaran. misalnya pemberian pelayanan (seringkali gratis) maupun realisasi bantuan (dana simpan pinjam yang diberikan oleh pemerintah seperti untuk di pergunakan untuk modal usaha. Dengan kata lain, policy effect yang baik dinilai dari cakupan (coverage) kelompok sasaran. Tahap berikutnya setelah kelompok sasaran menerima policy output adalah

dimanfaatkannya bantuan tersebut untuk kegiatan yang menunjang kehidupan utama kelompok sasaran. Sebagai seorang masyarakat menerima bantuan langsung masyarakat (BLM) simpan pinjam (SPP) dari pemerintah maka masyarakat tersebut menggunakan dana tersebut dengan lebih baik. Waktu penyaluran dana simpan pinjam (SPP) ini pada saat dana tersebut sudah dikeluarkan dari Kabupaten Natuna dengan sudah ditanda tangan oleh Bupati Kabupaten Natuna kalau sudah di tanda tangan maka dana tersebut keluar dan melalui Kecamatan seterusnya sampai ke Desa. dan jumlah dana PNPM bantuan langsung masyarakat (BLM) simpan pinjam (SPP) Rp 850.000.000 itu setiap kali keluar dananya, dan dana tersebut di pinjamkan kepada masyarakat simpan pinjam (SPP) guna untuk membuka usaha dan modal untuk masyarakat. Banyak sekali mengalami tunggakan karena sebagian masyarakat simpan pinjam (SPP) yang meminjam dana simpan pinjam (SPP) uangnya diperlukan untuk kegiatan lain dan sehingga dana tersebut tidak bisa disetorkanb kepada PNPM setiap bulannya, yang seharusnya disetorkan setiap bulannya dan dananya untuk pinjaman masyarakat selanjutnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka dari itu peneliti ingin mengetahui bagaimana menurut anda apakah dana simpan pinjam (SPP) ini sudah diberikan kepada masyarakat yang berhak menerima dana simpan pinjam (SPP) tersebut atau diberikan pada masyarakat yang mampu dan apakah sudah tepat sasarannya ?

Jawab dari pak Harto (ketua PNPM)

“sudah sesuai yang diberikan dana simpan pinjam (SPP) kepada masyarakat yang kurang mampu, sudah tepat sasaran karena disetiap dana simpan pinjam (SPP) akan keluar kami dari pihak PNPM mengutamakan masyarakat yang kurang mampu, dengan cara mengetahui masyarakat yang kurang kami mengecek data tersebut dari Desa mana yang berhak dan mana yang tidak dalam memiliki dana simpan pinjam tersebut.”

Hal senada peneliti mewawancarai Ibu Fitria (sekretaris PNPM) bagaimana menurut anda dana simpan pinjam (SPP) apakah yang dipinjamkan kepada masyarakat sudah dikembalikan tepat waktunya ?

Jawab Ibu Fitria (sekretaris PNPM)

“menurut saya dana simpan pinjam (SPP) yang dipinjamkan kepada masyarakat masih belum tepat cara mengembalikannya/setorannya

belum tepat waktu, karena dari sebagian yang menggunakan dana simpan pinjam (SPP) modalnya tidak bisa kembali lagi karena dipergunakan untuk keperluan lain sehingga dana tersebut habis dan tidak bisa dijadikan modal lagi.”

Selanjutnya peneliti mewawancarai Ibu Samsiah (masyarakat) bagaimana dari kelompok simpan pinjam (SPP) dalam mengembalikan dana simpan pinjam (SPP) apakah sudah sesuai dengan jumlah yang dipinjamkan sebelumnya?

Jawab Ibu Samsiah

“menurut saya disetiap kelompok pinjaman dana simpan pinjam (SPP) itu berjumlah 10 orang dalam 1 kelompok, dari 10 orang tersebut yang mengalami penyetoran lama itu ada 7 orang. Sedangkan selebihnya itu penyetor setiap bulannya. Di dalam 1 kelompok tersebut jumlah dana simpan pinjam yang diberikan pinjaman berjumlah Rp.47.368.000 itu ada 7 orang yang terlambat dalam penyetorannya. Dana yang terlambat dalam mengembalikan/penyetorannya senilai Rp. 6.766.800 itu sangat menghambat sekali dalam proses pinjaman dana simpan pinjam (SPP) selanjutnya.”

Selanjutnya peneliti mewawancarai Pak Harto (ketua PNPM) bagaimana pendapat anda mengenai dana simpan pinjam (SPP) dan dana tersebut digunakan oleh masyarakat untuk apa ?

Jawab dari pak Harto (ketua PNPM)

“dana simpan pinjam (SPP) sudah berjalan dengan baik hanya tahap pencairannya masih dikatakan lambat, karena faktor masyarakatnya yang meminjam dana tersebut cara mengembalikan dana tersebut lama karena dana tersebut di pergunakan masyarakat untuk dalam hal lain salah satunya untuk kebutuhan sehari-hari”.

Dari hasil wawancara diatas dapat kita ketahui dalam implementasi simpan pinjam (SPP) di Kecamatan Serasan Timur memiliki keterkaitan dengan bantuan langsung masyarakat (BLM) yang praktanya kantor PNPM Kecamatan Serasan Timur. Selanjutnya peneliti wawancara ibu Fatimah sebagai masyarakat bagaimana tanggapan masyarakat tentang penyaluran dana bantuan langsung masyarakat (BLM) simpan pinjam (SPP) yang ada di Kecamatan Serasan Timur ?

Jawab dari ibu Fatimah

“Sudah baik cara penyaluran bantuan langsung masyarakat (BLM) simpan pinjam (SPP) dari pnpm

mengadakan penyaluran dengan mengadakan pertemuan antara sejumlah masyarakat yang mau meminjam dana simpan pinjam (SPP) dengan anggota penguliran dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yaitu dari badan PNPM”.

Dari wawancara dengan narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proses bantuan langsung masyarakat (BLM) simpan pinjam (SPP) adanya tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah sangat membantu sekali masyarakat dalam simpan pinjam (SPP) guna memperlancar proses pinjaman masyarakat. Dan pelaksanaan bantuan langsung masyarakat (BLM) itu pun sudah baik karena disetiap dana simpan pinjam (SPP) akan cair atau keluar dananya dan dari PNPM melakukan musyawarah antar desa (MAD).

3. Pemanfaatan Dana Simpan Pinjam (SPP) dalam Implementasi Kebijakan PNPM Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) di Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna.

Pemanfaatan merupakan salah satu manfaat bagi masyarakat guna mempermudah masyarakat dalam simpan pinjam, dan memberikan

modal pinjaman kepada masyarakat dalam membuka usaha. Ini berguna bagi masyarakat dan kantor program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM). Ini merupakan cara membantu masyarakat yang kurang mampu dalam membuka usaha. Maka dari itu pnpm memberi bantuan untuk mempermudah masyarakat dalam hal itu.

Pada tahap pemanfaatan ini, peneliti akan merangkum informasi dari PNPM Kecamatan Serasan Timur berkaitan dengan bantuan langsung masyarakat (BLM) simpan pinjam (SPP). Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Herman (masyarakat) bagaimana dari kelompok simpan pinjam (SPP) digunakan untuk apa dana simpan pinjam (SPP) yang diberikan PNPM kepada masyarakat apakah sesuai yang diharapkan?

Jawab Pak Herman

“menurut saya kebanyakan dari kelompok simpan pinjam (SPP) itu adalah para ibu-ibu. Dari ibu-ibu yang menggunakan dana simpan pinjam (SPP) untuk bermodal usaha. Contohnya buka warung sembako, jualan baju, warung bakso, dan rumah makan. Dari PNPM sudah benar dalam menjalankan tugas yang dari pihak atas dalam hal

bantuan langsung masyarakat (BLM) tentang simpan pinjam (SPP) ini karena dari masyarakatnya saja yang belum tepat dalam penggunaan dana simpan pinjamnya, sudah berbuka usaha tapi hasilnya tidak ada, karena sebagian uangnya dipergunakan untuk dalam hal lain kalau digunakan untuk modal saja pasti akan cukup dan bisa mengembalikan penyeteroran kepada PNPM setiap bulannya.”

Peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Samsiah (masyarakat) apa yang menjadi hambatan bagi masyarakat simpan pinjam (SPP) dalam mengembalikan dana simpan pinjam (SPP) yang dipinjamkan PNPM kepada masyarakat ?

Jawab dari Ibu Samsiah (masyarakat) *“kebanyakan dari hasil yang kami lihat banyak dari masyarakat yang kami lihat banyak dari masyarakat yang tidak bisa mengembalikan dana simpan pinjam (SPP) yang di pinjamkan PNPM, karena kebanyakan masyarakat menyimpang dalam penggunaan dana tersebut dan diperlukan untuk kepentingan lain. Sampai pada akhirnya tidak bisa mengembalikan dana simpan pinjam (SPP) tersebut. Contoh dana yang dipergunakan masyarakat sampai tidak bisa dikembalikan lagi*

pinjamannya, masyarakat menggunakan dana simpan pinjam (SPP) untuk keperluan lain contohnya untuk membeli tv, motor, membuat rumah, dan untuk keperluan lainnya. Dan sehingga dana tersebut tidak bisa disetor setiap bulannya karena telah dipakai dan tidak bisa di setor kepada PNPM ”.

Berikut hasil wawancara dengan Fitria (sekretaris PNPM) bagaimana PNPM melakukan suatu tindakan jika ada dari salah satu masyarakat simpan pinjam (SPP) yang mengembalikan dana simpan pinjam (SPP) lama?

Jawab dari Ibu Fitria (sekretaris PNPM)

“yang dilakukan oleh PNPM adalah melakukan kunjungan di rumah masyarakat yang meminjam simpan pinjam tersebut, terus ditanyakan kepada masyarakat tersebut kalau masyarakat tersebut tidak mampu membayarnya maka akan dikasih tempo waktu kalau tidak mampu juga membayarnya maka apapun akan diambil oleh PNPM untuk menembus pembayar dana simpan pinjam (SPP) tersebut sesuai perjanjian awalnya antara masyarakat dengan PNPM , adapun yang bisa diambil PNPM kepada masyarakat yang tidak bisa

mengembalikan dana simpan pinjam (SPP) antara lain surat tanah, rumah, dan barang berharga lainnya”.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan pak Herman (masyarakat) pemanfaatan dari bantuan langsung masyarakat (BLM) simpan pinjam adapun pertanyaan peneliti dengan Ibu Fitria apa saja item-item yang bisa menjadi pemanfaatan yang berguna untuk bantuan langsung masyarakat (BLM) simpan pinjam (SPP) ?

Jawab dari pak Herman (masyarakat)

“1. Penambahan modal usaha simpan pinjam (SPP)

2.dapat membuat administrasi usaha simpan pinjam (SPP)

3.adanya bantuan dana sosial untuk orang yang tidak mampu/rumah tangga miskin (RTM) dari sisa hasil usaha (SHU) jasa simpan pinjam setiap tahunnya”.

Dari uraian pertanyaan di atas sangat jelas sekali bahwa adanya pemanfaatan sangat membantu sekali masyarakat miskin dan dari pemanfaatan ini juga bisa melihat pendukung dan penghambat dari dana bantuan langsung masyarakat (BLM) simpan pinjam (SPP). Dan bisa juga membantu rumah tangga miskin (RTM). Dan pemanfaatan bisa juga

untuk masyarakat yang tertinggal dan dengan adanya bantuan langsung masyarakat sangat membantu sekali masyarakat yang kurang mampu/miskin

E. KESIMPULAN

Hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan simpan pinjam di Kecamatan Serasan Timur kabupaten Natuna dilihat dari teori yang dikemukakan oleh Erwan Agus Purwanto bahwa Implementasi di tentukan oleh 3 faktor yakni Sosialisasi, Penyaluran, dan Pemanfaatan. Maka penulis akan memaparkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Sosialisasi

Dalam Implementasi Kebijakan simpan pinjam (SPP) ini penting adanya sebuah sosialisasi, Sosialisasi dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Sosialisasi secara langsung dilakukan melalui: ceramah, forum warga, sarasehan, dialog interaktif lewat radio/tv/internet. Sedangkan sosialisasi secara tidak langsung terjadi ketika para petugas garda depan (street-level bureaucrats) dalam mensosialisasikan suatu kebijakan tidak berinteraksi dengan kelompok sasaran maupun stakeholders secara face-to-face tetapi melalui papan pengumuman, pamlet,

leaflet, spanduk, brosur, buku saku, iklan layananan masyarakat lewat tv, radio, surat kabar, dan website. Didalam bantuan langsung masyarakat (BLM) simpan pinjam (SPP) dengan adanya sosialisasi secara langsung dan sosialisasi secara tidak langsung sangat membantu dalam pelaksanaan simpan pinjam (SPP). Dari penelitian nama Desa dan Kelompok Simpan Pinjam (SPP) di Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna.

2. Penyaluran

Dalam implementasi kebijakan simpan pinjam selain adanya masyarakat sebagai sasaran juga perlu adanya tenaga implementor yang berkompeten dengan jumlah yang cukup agar pelaksanaan program ini dapat terlaksana dengan baik dan sesuai yang diharapkan. Tahap berikutnya setelah kelompok sasaran menerima policy output adalah dimanfaatkannya bantuan tersebut untuk kegiatan yang menunjang kehidupan utama kelompok sasaran. Sebagai seorang masyarakat menerima bantuan langsung masyarakat (BLM) simpan pinjam (SPP) dari pemerintah maka masyarakat tersebut menggunakan dana tersebut dengan lebih baik.

3. Pemanfaatan

Dalam implementasi kebijakan simpan pinjam (SPP) di Kecamatan Serasan Timur pemanfaatan dana simpan pinjam belum dimanfaatkan dananya

dengan baik banyak yang salah dengan penggunaan dana tersebut. Dengan adanya dana simpan pinjam (SPP) ini mempermudah masyarakat dengan diberikan kemudahan ini maka dari masyarakat lagi yang menimbang bagaimana menggunakan dana tersebut dengan sebaik mungkin dan Pemanfaatan merupakan salah satu manfaat bagi masyarakat guna mempermudah masyarakat dalam simpan pinjam, dan memberikan modal pinjaman kepada masyarakat dalam membuka usaha. Ini berguna bagi masyarakat dan kantor program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM). Ini merupakan cara membantu masyarakat yang kurang mampu dalam membuka usaha. Maka dari itu pnpm memberi bantuan untuk mempermudah masyarakat dalam hal itu

F. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya tindakan yang tegas dalam menggunakan dana bantuan langsung masyarakat (BLM) simpan pinjam (SPP) supaya untuk memudahkan dan melancarkan bagi masyarakat yang meminjam selanjutnya, dan kalau dalam

pembayarannya berjalan dengan baik maka akan mudah bagi yang meminjam dana bantuan langsung masyarakat (BLM) simpan pinjam (SPP) yang selanjutnya. Dan misalnya dalam proses pembayarannya teratur maka otomatis kas dan tabungunya ada terus uangnya.

2. Untuk para karyawan di pnpm serasan timur tentang bantuan langsung masyarakat (BLM) simpan pinjam (SPP) agar bertindak adil kepada masyarakat dimana ada masyarakat yang lambat dalam pembayaran simpan pinjam (SPP) dan ada juga yang cepat dalam pembayaran simpan pinjamnya (SPP). Jadi yang lambat harus dikasih sanksi yang tegas dari pihak pnpm supaya dalam pembayarannya cepat dan sesuai yang diharapkan.

G. REFERENCE

Abidin, Said Zainal. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta. Punur Siwah.

Agus, Erwan Purwanto (2012) Implementasi Kebijakan Publik Yogyakarta: Gava Media

Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV. Alfabeta.

Nawawi, Hadari. 1996. Metode Penelitian Bidang Sosial. Gajah Mada University. Yogyakarta.

Satori Djam'an., Komariah Aan. 2011. Metode penelitian kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Tangkilisan, Hessel Nogis. S. 2003. Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta. Lukman Offsit.





LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : HENNI FRAMITA
 NIM / Periode lulus : E43012015 / 2017
 Tanggal Lulus : 30 Januari 2017
 Fakultas/ Jurusan : ISIP / ILMU PEMERINTAHAN
 Program Studi : SI
 E-mail address/ HP : 081522953552

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa HENNI FRAMITA pada Program Studi ILMU PEMERINTAHAN Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
 MASYARAKAT (PNPM) di KECAMATAN SERASAN TIMUR

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara *fulltext*
 content artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Mengetujui
 Pengelola Jurnal
 Bulida Marlina S.IP
 NIP. 1981006198006042020

Dibuat di : Pontianak
 Pada tanggal : 08-03-2017

Jef
 HENNI FRAMITA
 NIM. E43012015

Catatan :
 *tuliskan nama jurnal sesuai prodi masing-masing
 (Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)